



LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA

PT. SERTIFIKASI PERUSAHAAN INDONESIA

Jenis Usaha	: Pekerjaan Konstruksi
Sifat Usaha	: Spesial
Klasifikasi	: SPESIALIS (Konstruksi Khusus)
Kode Subklasifikasi	: KK004
Kode KBLI	: 42922
Deskripsi KBLI	: KONSTRUKSI PELINDUNG PANTAI.
Ruang Lingkup	: Kelompok Ini Mencakup Kegiatan Pekerjaan Bangunan Pelindung Pantai Termasuk Groin, Breakwater, Seawall, Artificial Headland, Beach Nourishment, Terumbu Buatan Dan Pekerjaan Lainnya Yang Sejenis.

KP BUJKA		
Penjualan Tahunan	Tidak Diperhitungkan	
Kemampuan Keuangan	Paling sedikit sama dengan Rp 5.000.000.000,-	
Tenaga Konstruksi	PJBU	1 orang PJBU (tidak dapat merangkap)
	PJTBU	1 Orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 9 (sembilan) sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi bangunan lepas pantai
	PJSKBU	1 Orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 8 (delapan) sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi bangunan lepas pantai.
Peralatan Utama	Paling sedikit 5 alat crawler crane, crew boat, forklift, formwork pier head, gantry launcher, generator set, gondola, grouting equipment, pile hammer, ponton material supply, scisso lift electric work platform, telescopic/boom lift work platform, theodolite,	

Penerapan SMAP	Sertifikat Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Terakreditasi, Dokumen Sistem Manajemen Anti Penyuapan, atau surat pernyataan komitmen memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen penyelenggaraan system manajemen anti penyuapan paling lambat 1 (satu) tahun.
Keanggotaan Asosiasi	Masih Berlaku dan Terdaftar di LPJK

BUJKN		
Penjualan Tahunan	Tidak Diperhitungkan	
Kemampuan Keuangan	Paling sedikit sama dengan Rp 5.000.000.000.-	
Tenaga Konstruksi	PJBU	1 orang PJBU (tidak dapat merangkap)
	PJTBU	1 Orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 8 (delapan) sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi bangunan lepas pantai.
	PJSKBU	1 Orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 7 (tujuh) sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi bangunan lepas pantai.
Peralatan Utama	Paling sedikit 2 alat crawler crane, crew boat, forklift, formwork pier head, gantry launcher, generator set, gondola, grouting equipment, pile hammer, ponton material supply, scisso lift electric work platform, telescopic/boom lift work platform, theodolite,	
Penerapan SMAP	Sertifikat Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Terakreditasi, Dokumen Sistem Manajemen Anti Penyuapan, atau surat pernyataan komitmen memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen penyelenggaraan system manajemen anti penyuapan paling lambat 2 (dua) tahun.	
Keanggotaan Asosiasi	Masih Berlaku dan Terdaftar di LPJK	

PMA	
Penjualan Tahunan	Tidak Diperhitungkan

Kemampuan Keuangan	Paling sedikit sama dengan Rp 5.000.000.000,-	
Tenaga Konstruksi	PJBU	1 orang PJBU (tidak dapat merangkap)
	PJTBU	1 Orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 8 (delapan) sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi bangunan lepas pantai.
	PJSKBU	1 Orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 7 (tujuh) sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi bangunan lepas pantai
Peralatan Utama	Paling sedikit 2 alat crawler crane, crew boat, forklift, formwork pier head, gantry launcher, generator set, gondola, grouting equipment, pile hammer, ponton material supply, scisso lift electric work platform, telescopic/boom lift work platform, theodolite,	
Penerapan SMAP	Sertifikat Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Terakreditasi, Dokumen Sistem Manajemen Anti Penyuapan, atau surat pernyataan komitmen memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen penyelenggaraan system manajemen anti penyuapan paling lambat 2 (dua) tahun.	
Keanggotaan Asosiasi	Masih Berlaku dan Terdaftar di LPJK	